

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti

Kadek Pratama Dharma Yuda^{1*}, I Nengah Suarmanayasa²



^{1,2,3} Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

pratamadarmayuda@gmail.com^{1}, nengah.suarmanayasa@undiksha.ac.id², wayan.cipta@undiksha.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji (1) faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah, (2) faktor yang paling dominan berpengaruh dalam kredit bermasalah dan (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Koperasi Susila Bhakti. Subjek dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti. Objek penelitian ini adalah anggota di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti Data dikumpulkan dengan kuesioner, dan dianalisis dengan analisis faktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti adanya campur tangan yang berlebihan, penyimpangan dalam prosedur, dan kurangnya pengawasan dari badan pengawas. Faktor yang paling dominan mempengaruhi kredit bermasalah yaitu faktor 3 dengan nilai varimax Rotation 0,927 yang berarti bahwa faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah didominasi oleh faktor 3 sebesar 0,927 lebih menekankan pada kelemahan kemampuan debitur.

Kata Kunci: kredit, koperasi, debitur, bunga

Abstract

The purpose of this study was to examine (1) the factors that influence non-performing loans, (2) the most dominant factors influencing non-performing loans and (3) the efforts made to overcome problem loans in the Susila Bhakti Cooperative. The subject in this study was the Civil Servant Cooperative (KPN) Susila Bhakti. The object of this study was members of the Civil Servant Cooperative (KPN) Susila Bhakti Data were collected by questionnaire, and analyzed by factor analysis. The results showed that the factors affecting non-performing loans in the Civil Servant Cooperative (KPN) Susila Bhakti were excessive interference, irregularities in procedures, and lack of oversight from the supervisory body. The most dominant factor influencing non-performing loans is factor 3 with varimax Rotation value of 0.927, which means that the factors affecting non-performing loans are dominated by factor 3 of 0.927, emphasizing the weakness of the debtor's ability.

Keywords: credit, koperasi, debtor, interest

Pendahuluan

Lembaga keuangan mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Salah satu contoh lembaga keuangan yang memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat adalah koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha (organisasi ekonomi) yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi (Maelani, 2011). Agar dapat memajukan dan meningkatkan usaha-usaha pada daerah dan tempat berdirinya koperasi, maka koperasi membutuhkan manajemen yang baik dan sehat dalam segala hal agar dapat mematuhi aturan yang tersedia pada koperasi, dan salah satu faktor yang cukup penting untuk meningkatkan usaha usaha milik koperasi adalah dengan adanya pinjaman atau kredit. Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (konstraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kredit yang lancar tentu saja akan membuat koperasi akan semakin baik atau berkembang tetapi pada nyatanya sering kali terdapat kasus atau masalah yang timbul pada koperasi yaitu tentang kredit bermasalah. Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam seringkali mengalami masalah, salah satunya disebabkan karena adanya kelemahan dalam koperasi maupun debitur. Bagi koperasi kelemahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah

Publisher: Undiksha Press

Licensed: This work is licensed under

a [Creative Commons Attribution 3.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



diberikan kepada debitur bahkan terjadi kredit macet. Dari pihak debitur, kelemahan yang dialami adalah ketidakmampuan melunasi kredit yang telah diberikan oleh koperasi.

Suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok karena adanya faktor internal maupun faktor eksternal. Menurut Mutamimah & Chasanah (2012) yang menganalisis bahwa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Faktor internal meliputi: (1) kebijakan perkreditan yang ekspansif, (2) lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah, (3) itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur. Sedangkan pada faktor eksternal meliputi: (1) kegagalan usaha debitur, (2) musibah terhadap debitor atau terhadap kegiatan usaha debitur, (3) menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit. (Kuncoro dan Suhardjono, 2011: 420) pengertian kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajiban seperti yang telah diperjanjikan.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti merupakan koperasi yang terletak di Kecamatan Sawan. Koperasi ini bergerak dibidang jasa layanan keuangan, salah satunya adalah system peminjaman uang. Di koperasi yang memiliki system kekeluargaan ini memiliki banyak anggota. Melalui sistem simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah akan memberikan keringan kepada anggota. Dengan kata lain, dipermudahkannya pemberian fasilitas kredit di koperasi diharapkan untuk bisa membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat pada umumnya.

Kenyataannya, semakin mudahnya pemberian jasa kredit kepada masyarakat, cenderung menjadi permasalahan yang serius dalam pembayaran kredit tersebut. Permasalahan akan terlihat pada pembayaran angsuran bulan-bulan berikutnya, karena kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok yang tertera pada angsuran tersebut. Dari data yang didapati di Koperasi Susila Bhakti terdapat beberapa dari anggota koperasi memiliki kredit yang bermasalah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang dominan dan sangat mempengaruhi kredit tersebut, dalam praktiknya seharusnya kualitas kredit harus dibarengi dengan jumlah yang disalurkan. Semakin berkualitasnya kredit yang dijalankan atau disalurkan kepada nasabah maka akan memperkecil risiko kredit tersebut bermasalah. Berdasarkan pemaparan diatas jumlah Kredit Diragukan sebanyak Rp. 337.009.806,- atau 12,94%, dan Kredit Kurang Lancar sebanyak Rp. 534.863.726,- atau 20,53%.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini sebagai sebuah penelitian yang berjudul Analisis Faktor -Faktor Kredit Bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti Kecamatan Sawan. Penelitian ini mengambil data tahun 2018.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini adalah diataranya (1) Apa saja faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti? (2) Faktor manakah yang paling dominan berpengaruh terjadinya kredit bermasalah? (3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah pada koperasi Susila Bhakti; (2) untuk mengetahui faktor yang paling dominan berpengaruh dalam kredit bermasalah di Koperasi Susila Bhakti; dan (3) untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Koperasi Susila Bhakti.

Metode

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian ini berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan juga untuk menentukan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka perlu dijelaskan dengan rancangan daritahap awal hingga akhir hasil penelitian. Adapun jenis data yaitu data primer dan sekunder sementara metode pengumpulan data dengan mengirim atau menyebarkan kuesioner kepada nasabah, kemudian dari hasil kuesioner akan dilakukan uji validitas untuk mengukur valid tidaknya pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner, dan juga melakukan uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Selanjutnya juga akan dilakukan uji analisis faktor setelah dilakukan uji tersebut akan mendapatkan hasil dan

pembahasan tentang penelitian ini, dan terakhir akan mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

Subjek dalam penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, Adapun populasi dari penelitian ini sebanyak 293, sedangkan pengurus koperasi sebanyak 5 orang dan pengawas koperasi sebanyak 3 orang. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive. Teknik penarikan sampel purposive atau disebut juga judgmental sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap sampel terutama orang-orang yang dianggap ahli. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pengurus dan badan pengawas yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada Koperasi Susila Bhakti serta anggota koperasi. Sampel dalam penelitian ini dilakukan pada 30 orang anggota di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti.

Variabel dalam penelitian ini yaitu kredit bermasalah. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kredit bermasalah yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1) adanya campur tangan yang berlebihan dalam keputusan kredit, (2) penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, (3) kurangnya pengawasan dari badan pengawas koperasi. Faktor eksternal meliputi: (1) Kegagalan usaha debitur, (2) musibah terhadap debitur, (3) pemanfaatan iklim persaingan yang tidak sehat. Masing-masing variabel akan dijabarkan kedalam indikator-indikator yang akan menjadi pertanyaan kepada responden dalam penelitian ini.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah jumlah kredit bermasalah yang bersumber dari laporan keuangan tahun 2018 yang diperoleh langsung dari bagian keuangan di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, data primer dalam penelitian ini berupa skor hasil kuesioner yang diperoleh dalam survei dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan kepada responden terpilih, sedangkan data sekunder seperti jumlah nasabah yang mengalami kredit bermasalah, laporan keuangan Koperasi, jumlah pengurus, dan badan pengawas koperasi.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi lapangan dan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang akan disebar ke responden terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti Kecamatan Sawan. Kuisisioner sebagai instrument pengumpulan data ordinal yang merupakan penjabaran dari indikator variabel sebelum digunakan untuk mengumpulkan data dilapangan terlebih dahulu harus melalui tahap uji validitas dan reliabilitas.

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid tidaknya pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner. Dan membandingkan rhitung dengan rtabel, akan dikatakan valid jika rhitung > rtabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai cronbach alpa dari masing-masing instrumen dalam variabel. Nilai cut off untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai cronbach alpa > 0,60

Analisis data dilakukan dengan analisis factor. Analisis factor digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan atau menjelaskan kredit bermasalah pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti di Kecamatan Sawan. Analisis faktor adalah serangkaian prosedur yang digunakan untuk mengurangi dan meringkas data tanpa kehilangan informasi penting dengan beberapa tahapan yang pertama merumuskan masalah. Variabel-variabel dan data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis factor.

Yang kedua membuat matrik Korelasi. Semua data yang masuk dan diolah akan menghasilkan matrik korelasi. Dengan adanya matrik korelasi dapat diidentifikasi variabel-variabel tertentu yang tidak mempunyai korelasi dengan variabel yang lain sehingga dapat dikeluarkan dari analisis. Untuk menguji ketepatan model analisis faktor, maka dapat digunakan Barlell's est of Sphericily yang dipakai untuk menguji bahwa variabel-variabel dalam sampel berkorelasi. Hasil Barleu's est sof Sphericily menunjukkan apakah ada hubungan antara variabel-variabel signifikan atau tidak. Statistik lain yang berguna adalah pengukuran kelayakan sampel Kaiser Meyer Olkin (KMO). Analisis faktor dianggap layak jika besaran KMO nilainya minimal 0,5. Besaran lain yang dilihat adalah nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA). Besaran ini digunakan untuk mengukur derajat korelasi antar variable.

Yang ketiga menentukan jumlah factor. Variabel disusun kembali berdasarkan pada korelasi hasil langkah pada butir untuk menentukan jumlah faktor yang diperlukan untuk mewakili data. Untuk menentukan berapa faktor yang dapat diterima secara empiric dapat dilakukan berdasarkan besarnya eigenvalue setiap faktor yang muncul. Semakin besar eigenvaluesetiap faktor, semakin representative faktor tersebut untuk mewakili sekelompok variabel. Faktor-faktor ini yang dipilih adalah faktor yang mempunyai eigenvalue sama atau lebih dari satu.

Yang keempat rotasi factor. Hasil penyederhadaan faktor dalam matrik memperlihatkan hubungan antara faktor dengan variabel individual tetapi juga dalam faktor tersebut terdapat sangat banyak variabel yang berkorelasi sehingga sulit diinteprestasikan. Dengan menggunakan rotasi faktor matrik, matrik faktor ditransformasi ke dalam matrik yang lebih sederhana agar lebih mudah untuk diinterprestasikan. Dalam perilaku ini digunakan rotasi varimax.

Yang ketarkhir Intepretasi. Intepretasi faktor dilakukan dengan mengelompokan variabel yang mempunyai faktor loading tinggi ke dalam faktor tersebut, untuk menginteprestasikan hasil penelitian ini, faktor loading minimal 0,5. Karena data yang di dapat dari kuesioner, sedangkan analisis data yang dipakai untuk membuktikan kebenaran pengujian analisis faktor mengisyaratkan minimal data interval maka data tersebut perlu ditingkatkan skala pengukurannya.

Hasil dan Pembahasan

Analisis faktor digunakan untuk mengelompokkan data atau pembentukan suatu variabel baru dengan melihat keeratan hubungan atau korelasi antar variabel indenpenden yang diteliti. Adanya matrik korelasi dapat mengidentifikasi variabel-variabel tertentu yang tidak mempunyai korelasi dengan variabel yang lain sehingga dapat dikeluarkan dari analisis. Untuk menguji ketepatan model analisis faktor, maka dapat digunakan Bartlett's Test of Sphericity yang dipakai untuk menguji bahwa variabel-variabel dalam sampel berkorelasi. Hasil Bartlett's Test of Sphericity menunjukkan apakah ada hubungan antara variabel-variabel signifikan atau tidak. statistik lain yang digunakan adalah pengukuran kelayakan sampel Kaiser Meyer Olkin (KMO). Analisis faktor dianggap layak jika besaran KMO nilainya minimal 0,5. Besaran lain yang dilihat adalah nilai Measure of Sampling Adequacy (MSA). Berdasarkan hasil uji Kaiser Meyer Olkin atau uji kelayakan sample (KMO) memiliki nilai sebesar 0,576 yang artinya sudah lebih besar dari standar nilai yang telah ditentukan yaitu 0,50 untuk analisis faktor selanjutnya dan hasil uji Bartlett's Test of Sphericity menunjukkan nilai Sig. 0,000 hal ini menunjukkan bahwa matrik korelasi memiliki korelasi yang signifikan dengan sejumlah faktor, karena nilai Sig 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil uji tersebut maka matrik korelasi layak digunakan untuk analisis faktor.

Pada hasil output Anti-image matrixs, dapat diketahui faktor-faktor yang layak digunakan untuk analisis faktor. Hasil output anti-image corelation, terdapat kode a yang

artinya tanda untuk Measure of Sampling Adequacy (MSA). Faktor yang layak digunakan untuk analisis faktor adalah faktor yang memiliki nilai MSA $> 0,50$. Jika terdapat faktor yang memiliki nilai MSA $< 0,50$ maka faktor tersebut dikeluarkan dan dilakukan analisis ulang untuk faktor yang memiliki nilai MSA $> 0,50$. Diketahui faktor-faktor yang akan digunakan dalam analisis faktor antara lain (1) adanya campur tangan yang berlebihan, (2) penyimpangan dalam prosedur, (3) kurangnya pengawasan dari badan pengawas, (4) kegagalan usaha debitur, (5) musibah terhadap debitur, dan (6) pemanfaatan persaingan yang tidak sehat.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti

Untuk menentukan banyaknya faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti, dapat dilihat dari nilai eigenvalue dan persentase masing-masing faktor. Hasil Output Total Variance Explained menunjukkan ada tiga faktor yang memiliki nilai eigenvalue > 1 yaitu faktor satu (adanya campur tangan yang berlebihan) memiliki nilai eigenvalue 2,008 dengan nilai percentage variance 33,462 %. Faktor kedua (penyimpangan dalam prosedur) memiliki nilai eigenvalue sebesar 1,425 dengan nilai percentage variance 23,744% dan faktor ketiga (kurangnya pengawasan dari badan pengawas) memiliki nilai eigenvalue sebesar 1,049 dengan nilai percentage variance 17,483%. Ketiga faktor yang terbentuk memiliki nilai Cumulative Percentage of Variance sebesar 74,689% yang berarti bahwa ketiga faktor yang terbentuk mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti sebesar 74,689%.

Faktor Yang Paling Dominan Mempengaruhi Kredit Bermasalah Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, untuk mengetahui faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti, maka digunakan parameter koefisien Varimax yang memiliki nilai mendekati 1 atau -1. Nilai yang mendekati 1 dimulai dari nilai 0,5 sedangkan nilai yang mendekati -1 dimulai dari nilai -0,5. Dari hasil analisis maka faktor yang paling dominan mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti yaitu faktor 3 dengan nilai varimax Rotation 0,927 yang berarti bahwa faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti didominasi oleh faktor 3 sebesar 0,927 lebih menekankan pada kelemahan kemampuan debitur.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti

Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti dengan masing-masing dimensinya yaitu faktor adanya campur tangan yang berlebihan, penyimpangan dalam prosedur, kurangnya pengawasan dari badan pengawas, kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur, dan pemanfaatan persaingan yang tidak sehat. (1) adanya campur tangan yang berlebihan, dimensi ini mempengaruhi kredit bermasalah pada KPN Susila Bhakti sebesar 0,702. Menurut Kepala KPN Susila Bhakti (I Nengah Sudiarta) ketika diwawancarai Selasa, 05 Mei 2020 menyatakan.

“Kami dari pengurus KPN Susila Bhakti sangat sulit untuk menerapkan sistem pencarian kredit yang sesuai dengan aturan, karena asas koperasi adalah sistem kekeluargaan dan mensejahterakan anggotanya. Banyak intervensi yang akhirnya membuat pencairan kredit menjadi semakin mudah. Asas kepercayaan dan salah satu

dari pengurus mengenal dan akrab dengan debitur sehingga proses tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya”

Internal KPN Susila Bhatkti tidak sepenuhnya menjalankan analisis 5C yang ada sebelum kredit disalurkan kepada debitur, hanya menerapkan 4C (character, capacity, capital dan condition). Tidak adanya Colleteral atau jaminan dalam menyalurkan kredit kepada calon debitur dan tidak menjalankan prinsip 7P serta tidak ada tenaga ahli dalam melakukan analisis kredit, sehingga hal ini dapat memicu terjadinya kredit bermasalah. Akan tetapi walaupun tidak menggunakan jaminan pihak pengurus KPN Susila Bhakti melihat bagaimana jiwa sosialnya di masyarakat sehingga ini menjadi salah satu acuan dalam pemberian kredit kepada calon debitur. (2) penyimpangan dalam prosedur, dimensi ini mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti sebesar 0,866 dipengaruhi oleh prosedur pemberian kredit yang tidak sesuai dengan tahapan prosedur yang berlaku (pengajuan berkas permohonan kredit, penyelidikan berkas-berkas calon debitur, wawancara 1, kunjungan tempat jaminan, wawancara 2, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi kredit). Hasil wawancara dengan Kepala KPN Susila Bhakti menyatakan.

“Kami dari pihak pengurus koperasi ketika ada calon debitur yang mau mengajukan permohonan kredit pertama calon debitur harus membawa surat permohonan pengajuan kredit yang sudah ditandatangani oleh atasan yaitu kepala sekolah atau pengawas sekolah, kedua wawancara, ketiga peninjauan kondisi ekonomi debitur dilapangan, keempat kesepakatan kredit dan realisasi kredit”

Terlihat bahwa pihak KPN Susila Bhakti dalam prosedur pemberian kredit menerapkan 4 prosedur dari 8 prosedur pemberian kredit yang ada, sehingga hal ini dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah di koperasi tersebut. (3) kurangnya pengawasan dari badan pengawas, dimensi ini mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti sebesar 0,702 yang dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dari badan pengawas. Menurut Kepala KPN Susila Bhakti ketika diwawancarai menyatakan.

“Kami mengetahui jika seorang badan pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam proses evaluasi segala sistem yang berjalan di koperasi. Badan pengawas di KPN Susila Bhakti adalah seorang guru dan kepala sekolah yang memiliki waktu penuh di sekolah sehingga waktu untuk evaluasi minim dan cenderung tidak teratur. Mengikuti waktu luang mereka setelah melaksanakan tugas utama di sekolah masing-masing. Sehingga tidak efektifnya badan pengawas dalam evaluasi sistem di koperasi”

Kurangnya waktu yang dimiliki oleh badan pengawas sehingga menyebabkan proses evaluasi berjalan tidak terjadwal sehingga hal ini dapat mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti. (4) kegagalan usaha debitur, dimensi ini mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti sebesar 0,866 yang di pengaruhi karena banyak usaha yang mengalami kegagalan sehingga pembayaran kredit menjadi terhambat, sehingga dapat merugikan pihak koperasi karena kredit yang diberikan kepada debitur digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Hal inilah yang dapat mempengaruhi kredit bermasalah. Hal ini yang mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti. Ini sesuai dengan pernyataan Kepala KPN Susila Bhakti ketika diwawancarai.

“Beginilah keadaan karakter debitur di lapangan, ada yang berkelip ketika kami hendak menagih kredit dan bahkan ada yang marah ketika kami menagih kredit. seperti itulah keadaan dilapangan. Banyak kredit yang kami berikan untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli sepeda motor, kredit yang kami berikan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, sangat jarang kredit yang kami berikan untuk membuka usaha atau memperbesar usaha.”

Kegagalan usaha debitur inilah yang menyebabkan kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti. (5) Musibah terhadap debitur, dimensi ini mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti sebesar 0,751 yang di pengaruhi karena debitur mengalami musibah seperti kematian, kecelakaan dan yang paling banyak adalah sakit. Hal ini sangat mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti. Ini sesuai dengan pernyataan Kepala KPN Susila Bhakti ketika diwawancarai.

“Banyak debitur yang mengalami musibah sakit ketika masih memiliki kredit dengan jangka waktu yang masih panjang. Misalnya mengalami sakit Struk sehingga membutuhkan biaya yg lebih besar dalam perobatan. Hal ini yang menghambat proses pembayaran kredit.”

Musibah yang dialami oleh debitur menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti (6) Pemanfaatan persaingan yang tidak sehat, dimensi ini mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti sebesar 0,831 yang di pengaruhi karena banyaknya promo dari pihak bank serta lembaga lain sehingga pihak koperasi memberikan kredit secara gampang. Ini sesuai dengan pernyataan Kepala KPN Susila Bhakti ketika diwawancarai.

“Kita mengakui mengalami persaingan yang tidak sehat dalam pemberian kredit. Jika anggota lebih nyaman meminjam uang di lembaga lain dengan diberikan iming-iming yang menarik. Mengapa kita tidak bisa. Misalnya proses cepat, biaya administrasi kecil, dll. Hal ini awalnya kami lakukan agar anggota tetap memiliki KPN Susila Bhakti.”

Faktor Yang Paling Dominan Dalam Mempengaruhi Kredit Bermasalah Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti

Faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti yaitu sebagai berikut. Faktor 1 yaitu dengan nilai variance explained sebesar 33,462% atau dengan nilai varimax rotation sebesar 0,840 yang berarti bahwa dimensi kredit bermasalah (adanya campur tangan yang berlebihan) yang mendominasi pada faktor internal. Dimensi adanya campur tangan yang berlebihan mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti disebabkan karena adanya hubungan kedekatan yang menyebabkan prosedur yang telah ada tidak sepenuhnya diterapkan. Pihak KPN Susila Bhakti tidak menerapkan tahapan prosedur pemberian kredit seperti pengajuan berkas permohonan kredit, penyelidikan berkas-berkas calon debitur, wawancara 1, kunjungan ketempat jaminan, wawancara 2, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi kredit. Hanya karena memiliki kedekatan dengan pengurus sehingga bisa mendapatkan kredit dengan cepat. Seperti hasil wawancara dengan Ketua KPN Susila Bhakti menyatakan.

“Kami dari pengurus KPN Susila Bhakti sangat sulit untuk menerapkan sistem pencarian kredit yang sesuai dengan aturan, karena asas koperasi adalah sistem kekeluargaan dan mensejahterakan anggotanya. Banyak intervensi yang akhirnya membuat pencairan kredit menjadi semakin mudah. Asas kepercayaan dan salah satu dari pengurus mengenal dan akrab dengan debitur sehingga proses tersebut tidak melalui prosedur yang seharusnya”.

Faktor internal yang merupakan faktor yang kedua mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti adalah penyimpangan prosedur dengan nilai variance explained sebesar 23,744% atau dengan nilai varimax rotation sebesar 0,927 yang berarti bahwa dimensi kredit bermasalah (penyimpangan dalam prosedur) yang mendominasi pada faktor internal

Ada tahapan-tahapan prosedur pemberian kredit yang tidak dijalankan oleh pihak KPN Susila Bhakti seperti peninjauan obyek jaminan (jika jumlah pinjaman lebih dari Rp.60.000.000,-) dan memang pihak koperasi tidak menggunakan jaminan ketika merealisasikan kredit ke calon debitur sehingga hal ini menjadi kelemahan dan hal ini memicu terjadinya kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti.

Faktor eksternal dengan nilai Variance Explained sebesar 17,483% ini berarti bahwa dimensi kredit bermasalah (kurangnya pengawasan dari badan pengawas) yang mendominasi pada faktor eksternal, dengan nilai varimax rotation sebesar 0,702. Dimensi kurangnya pengawasan dari badan pengawas mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti, seperti yang dikatakan oleh Ketua KPN Susila Bhakti.

“Kami mengetahui jika seorang badan pengawas memiliki peran yang sangat penting dalam proses evaluasi segala sistem yang berjalan di koperasi. Badan pengawas di KPN Susila Bhakti adalah seorang guru dan kepala sekolah yang memiliki waktu penuh di sekolah sehingga waktu untuk evaluasi minim dan cenderung tidak teratur. Mengikuti waktu luang mereka setelah melaksanakan tugas utama di sekolah masing-masing. Sehingga tidak efektifnya badan pengawas dalam evaluasi sistem di koperasi”

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti yaitu faktor tiga (eksternal) dan faktor satu dan dua (faktor internal). Faktor satu memiliki nilai Percentage of Variance sebesar 33,462% , faktor kedua memiliki nilai Percentage of Variance sebesar 23,744% dan faktor ketiga memiliki nilai Percentage of Variance sebesar 17,483%. Ketiga faktor tersebut memiliki Cumulative Percentage of Variance sebesar 74,689% yang berarti bahwa kedua faktor tersebut mampu menjelaskan pengaruhnya sebesar 74,689% terhadap kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti dan sisanya 25,311% dipengaruhi faktor lain seperti lembaga tidak dapat bersaing dengan pasar dan perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur (Ismail, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling mendominasi atau dominan mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti yaitu faktor internal dengan nilai variance rotation 33,462% yang berarti bahwa faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti didominasi oleh faktor internal, menekankan pada adanya campur tangan yang berlebihan dan penyimpangan dalam prosedur. Faktor yang dominan dalam mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti yaitu faktor internal hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Thamrin (2016) yang menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah adalah faktor internal dan eksternal, faktor yang paling dominan adalah faktor internal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis dengan menggunakan analisis faktor untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti maka ada dua dimensi yang perlu diberikan perhatian khusus oleh ketua KPN Susila Bhakti yaitu adanya campur tangan yang berlebihan dan penyimpangan dalam prosedur karena kedua dimensi ini dominan dalam mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti, untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah yang berkelanjutan maka pihak KPN Susila Bhakti perlu memperhatikan tahapan-tahapan dalam prosedur pemberian kredit dan melakukan penelusuran terhadap kemampuan debitur dilihat dari jenis usaha yang akan dibuka, motif peminjaman kredit, dan keadaan usaha dan pengetahuan yang dimiliki debitur.

Upaya-Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti

Permasalahan kredit bermasalah yang terjadi di KPN Susila Bhakti menyebabkan kondisi keuangan koperasi menjadi kurang baik dan koperasi kehilangan kepercayaan dari anggota yang merupakan sumber pendapatan dana bagi pihak koperasi sehingga dari permasalahan tersebut pihak koperasi harus berbenah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengembalikan kepercayaan anggota yang berada dilingkungan koperasi Kecamatan Sawan tersebut. Beberapa upaya atau tindakan yang dilakukan KPN Susila Bhakti dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah diantaranya: Tindakan preventif atau tindakan pencegahan merupakan tindakan yang dilakukan KPN Susila Bhakti dalam upaya mengantisipasi permasalahan kredit yang akan disalurkan kepada anggota. Menurut Badan Pengawas (I Gede Widiana) yang diwawancarai pada Senin, 11 Januari 2020 menyatakan.

“Sebelum calon debitur mengajukan permohonan kredit ke koperasi, calon debitur harus membawa surat permohonan kredit yang sudah ditandatangani oleh atasan dan setelah mendapat persetujuan baru bisa mengajukan permohonan kredit ke koperasi”.

Ini senada dengan pernyataan Ketua KPN Susila Bhakti ketika diwawancarai yang menyatakan.

“Kami dari pihak pengurus koperasi ketika ada calon debitur yang mau mengajukan permohonan kredit pertama calon debitur harus membawa surat permohonan pengajuan kredit yang sudah ditandatangani oleh atasan yaitu kepala sekolah atau pengawas sekolah, kedua wawancara, ketiga peninjauan kondisi ekonomi debitur dilapangan, keempat kesepakatan kredit dan realisasi kredit”

Dalam prosedur pemberian kredit ada beberapa tahapan atau prosedur yang harus dilakukan mulai dari penyerahan bekas calon debitur, penyelidikan berkas calon debitur, wawancara pertama, meninjau obyek jaminan, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, dan relisasi kredit. Menurut Ketua KPN Susila Bhakti ketika diwawancarai tahapan atau prosedur dalam pemberian kredit kepada calon debitur adalah sebagai berikut.

“Kami dari pihak pengurus koperasi ketika ada calon debitur yang mau mengajukan permohonan kredit pertama calon debitur harus membawa surat permohonan pengajuan kredit yang sudah ditandatangani oleh atasan yaitu kepala sekolah atau pengawas sekolah, kedua wawancara, ketiga peninjauan kondisi ekonomi debitur dilapangan, keempat kesepakatan kredit dan realisasi kredit”

Kelemahan dalam sistem pengelolaan KPN Susila Bhakti khususnya dalam hal prosedur penyaluran kredit dapat terlihat dari tidak adanya sanksi yang dijalankan baik oleh pihak KPN Susila Bhakti. Kredit yang disalurkan hanya berdasarkan pada prediksi dan sistem kekeluargaan tanpa ada sanksi yang jelas dalam mengatur pengelolaan koperasi tersebut. Hal ini senada dengan pernyataan dari Ketua KPN Susila Bhakti ketika diwawancarai.

“Memang tidak ada sanksi yang kami jalankan untuk mengatur atau melindungi kredit yang kami jalankan, baik sanksi dari pihak koperasi, ini merupakan kelemahan kami dalam mengelola koperasi ini, sebenarnya kami memiliki sanksi tegas akan tetapi karena koperasi menggunakan asas kekeluargaan. Sehingga sanksi

tersebut tidak dapat diterapkan dengan tegas. Karena tidak ada sanksi, hal ini yang menyebabkan banyak nasabah yang memiliki kredit bermasalah”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KPN Susila Bhakti (I Nengah Sudiarta) dan Badan pengawas (I Gede Widiana) terlihat bahwa dalam dalam prosedur pemberian kredit tidak menjalankan keseluruhan tahapan dalam prosedur pemberian kredit yaitu mulai dari penyerahan bekas calon debitur, penyelidikan berkas calon debitur, wawancara pertama, meninjau obyek jaminan, wawancara kedua, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit, dan relisasi kredit. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti hanya menjalankan empat tahapan yaitu mulai dari calon debitur membawa surat permohonan kredit yang sudah disetujui oleh atasan, wawancara, peninjauan kondisi ekonomi calon debitur, dan keputusan kredit dan realisasi kredit. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti hanya menjalankan empat prosedur dari delapan prosedur yang ada. Kemudian analisis kredit dalam suatu analisis kredit ada yang namanya analisis 5C (character, capacity, capytal, colleteral, condition). Analisis kredit yang dilakukan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti hanya melihat karakter calon debitur, kemampuan calon debitur, pekerja calon debitur, dan kondisi ekonomi calon debitur. Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti hanya melakukan analisis 4C dari analisis 5C yang ada. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak menggunakan jaminan dan tidak ada sanksi dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti sehingga hal ini dapat memicu terjadinya kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti.

Tindakan korektif merupakan tindakan yang dilakukan setelah terjadi kredit bermasalah. Pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti dalam menyelesaikan kredit bermasalah selalu mengedepankan sistem kekeluargaan. Menurut Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti menyatakan.

“Tindakan pertama yang kami lakukan dalam mengatasi kredit bermasalah yaitu dengan mendatangi langsung debitur yang memiliki kredit, kami melakukan negosiasi, mencari tahu apa yang menyebabkan debitur mengalami kedit bermasalah, apakah mengalami gagal usaha, musibah, atau jumlah beban hutang yang dimiliki banyak sehingga tidak bisa membayar kredit, kami melakukannya dengan cara kekeluargaan agar debitur tidak takut dan mau terbuka dengan pihak koperasi”

Jika dengan cara mendatangi langsung kelapangan, debitur juga tidak mau menjalankan kewajibannya maka sesuai dengan pernyataan Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti ketika diwawancarai menyatakan.

“Jika dengan cara pertama debitur yang memiliki kredit bermasalag tidak ada etiked baik untuk menjalankan kewajibannya maka dalam rentangan waktu dua minggu kami dari pihak koperasi akan memberikan surat panggilan yang disetujui oleh atasan kepada debitur untuk datang kekantor koperasi melakukan negosisasi dan mencari solusi dalam meyelesaikan kredit tersebut”

Hal tersebut dipertegas oleh Badan Pengawas (I Gede Widiana) ketika diwawancarai menyatakan.

“Ia jika ada debitur yang memiliki kredit bermasalah, kami selaku badan pengawas akan memanggil debitur tersebut dalam kurun waktu dua minggu setelah jatuh tempo pembayaran. Debitur yang memiliki kredit bermasalah dipanggil untuk datang ke

kantor koperasi dan melakukan negosiasi serta mencari tahu apa penyebab debitur mengalami kredit bermasalah”

Penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan pihak Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti sesuai dengan pernyataan Ketua Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti.

“setelah kami tahu apa penyebab debitur mengalami kredit bermasalah, kami mengambil tindakan untuk melakukan penggabungan pokok dengan bunga kemudian memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit, bahkan kami melakukan perpanjangan waktu pengembalian kredit ada yang sampai 3 tahun”

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Badan Pengawas (I Gede Widiana) menyatakan.

“cara yang kami lakukan dalam menyelesaikan persoalan tentang kredit bermasalah ya dengan cara menggabungkan pokok dengan bunga dan juga memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit, hanya itu yang kami bisa lakukan untuk mengatasi kredit bermasalah yang terjadi di koperasi kami. Ini adalah cara terakhir jika dengan cara kekeluargaan tidak bisa menyelesaikan masalah kredit bermasalah ini.”

Sanksi yang lemah dan tidak adanya jaminan yang melindungi kredit yang disalurkan kepada debitur sehingga debitur menjadi acuh tak acuh pada kewajibannya untuk membayar kredit. Untuk menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah yang dihadapi, pihak koperasi melakukan penggabungan bunga dengan pokok dan memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit sehingga dengan demikian dapat meringankan beban dari pihak debitur serta memberikan sanksi dikeluarkan dari Badan pengawas bagi debitur yang sudah diberikan keringanan tetapi tidak mau menjalankan kewajibannya.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dari analisis data dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Susila Bhakti adalah faktor internal (adanya campur tangan yang berlebihan dan penyimpangan dalam prosedur) dan faktor eksternal (kurangnya pengawasan dari badan pengawas). Dari hasil analisis maka faktor yang paling dominan mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti yaitu faktor 3 dengan nilai varimax Rotation 0,927 yang berarti bahwa faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti didominasi oleh faktor 3 sebesar 0,927 lebih menekankan pada kelemahan kemampuan debitur. (2) Upaya-upaya yang dilakukan KPN Susila Bhakti untuk mengatasi kredit bermasalah yaitu dari segi tindakan preventif (a) Calon debitur harus membawa surat permohonan kredit yang sudah disetujui oleh atasan, (b) melakukan analisis 4C kecuali collteral, dan melihat jiwa sosial calon debitur. Dari segi tindakan korektif (a) Ketua KPN Susila Bhakti langsung mendatangi debitur ke lapangan untuk melakukan pendekatan dan negosiasi, (b) debitur diberikan surat panggilan oleh ketua dan pengawas KPN Susila Bhakti D untuk datang ke KPN Susila Bhakti dan melakukan negosiasi secara kekeluargaan, (c) pihak KPN Susila Bhakti melakukan recheduling dan reconditioning untuk meringankan beban hutang debitur, (d) memberikan sanksi kepada debitur yang memiliki kredit bermasalah.

Bagi pihak koperasi berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menyarankan untuk lebih memfokuskan dalam melakukan analisis kredit 5C khususnya pada kemampuan debitur yang akan mengajukan permohonan kredit, mengingat bahwa faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti dominan faktor eksternal yaitu kurangnya pengawasan dari badan pengawas sehingga pihak KPN Susila Bhakti perlu mengetahui dengan jelas bagaimana kemampuan dari calon debitur yang dapat dilihat dari kondisi usaha yang dijalani oleh debitur, pekerjaan dan tanggungan biaya hidupnya. Kemudian faktor internal yaitu kelemahan prosedur pemberian kredit pihak koperasi perlu menerapkan prosedur pemberian kredit yaitu mulai dari pengajuan berkas permohonan kredit, penyelidikan berkas-berkas calon debitur, wawancara 1, kunjungan ketempat jaminan, wawancara 2, keputusan kredit, penandatanganan perjanjian kredit dan realisasi kredit. dan pihak koperasi harus menerapkan adanya jaminan dalam realisasi kredit kepada debitur.

Daftar Pustaka

- Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, dkk 2005. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: Kencana Predana Media.
- Azwar, S., 1987. Tes Prestasi. Yogyakarta : Liberty
- Dahlan Siamat, 1993. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Intermedia.
- Djoni S. Gazali. 2010. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Febriana, 2018. Analisis Penyelesaian Kredit Macet pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN)baghia kota Kediri. Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri. Vol 3 No 1 Halaman 65-72.
- Gatot Supramono, 2009. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Rineka Cipta.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Hariyani, 2010. Non Performing Loan (NPL) atau Kredit Bermasalah. Malang: Lila Rahmatin Nazila.
- Hermansyah. 2009. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hendrojogi. 2007. Koperasi: Asas-asas, Teori, dan Praktik Edisi Empat . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada .
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2014. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2014. Analisis Laporan Keuangan, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kasiram, Moh. 2008. Metodologi Penelitian. Malang: UIN-Malang Pers.
- Kuncoro dan Suhardjono (2011) Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Khosmas, S.P. 2016. Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Karyawan Tirta Dharma Khatulistiwa Kota Pontianak. Jurnal Universitas Tanjungpura. Vol 5 No 2. Tereidia pada: <https://media.neliti.com/media/publications> (diakses 25 November 2019).
- Kusuma, K.A.S. 2016. Analisis Kredit Macet pada KPN Satya Bakti Kecamatan Jembrana

- Kabupaten Jembrana. Jurnal Agribisnis dan Agrowisata. Vol.5 No.1. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media> (diakses 26 November 2019).
- Mahmoedin, 2004. Kredit Bermasalah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mahardika, 2014. Pengaruh Kredit Bermasalah dan Penyaluran Kredit Terhadap Laba pada lembaga perkreditan desa (LPD). Jurnal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha. Vol 2 No 1 Halaman 98-105.
- Mutamimah & Chasanah, 2012. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah. Universitas Brawijaya: Rizal Nur Firdaus.
- M.Yahya Harahap, 1992. Segi-Segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
- Prasetyo. 2007. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya: Arkola.
- Raharja Handikusuma. 2000. Hukum Koperasi Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- R.Daeng Naja. 2005. Hukum Kredit dan Bank Garansi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, 2002. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suarjaya, I.N. 2015. Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung. Jurnal Pendidikan Ekonomi. Vol.5 Nomor 1. Tersedia pada: <https://media.neliti.com/media/publications> (diakses 26 November 2019).
- Subekti. 1987. Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bhakti.
- Suciningtyas, Suparno dan Istiqlal. 2014. Metode penyelesaian kasus kredit bermasalah di luar pengadilan (Studi Kasus PT. BPR Weleri Makmur Cabang Kudus). Jurnal Universita Muria Kudus. Vol 18 No 2 Halaman 1-9.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabetis.
- Suyatno Thomas, Marala, Djuhaepah, T. Abdullah, Azhar Aponno, Johan Thomas, Ananda, C. Tinonyunianti, Chalik, Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2012 tanggal 29 Oktober 2012 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok perkoperasian.
- Wiersma. William. 1986. Research Methods in Education: An Introduction. Boston Allyn and Bacon.